

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA STUDI DI DESA SEPAKAT
KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA**

Desak Putu Irmalasari¹, Dr. Yuliatin, S.Pd., M.H.², Edy Kurniawansyah, S.Pd.,
M.Pd.³

¹PPKn FKIP Universitas Mataram, ²PPKn FKIP Universitas Mataram,

³PPKn FKIP Universitas Mataram

Alamat e-mail : 1desakputuirmalasari.com, 2hiyuliatin3@gmail.com

, 3edykurniawansyah@unram.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the function of the village government in the implementation of development in Sepakat Subdistrict Plampang Sumbawa Regency and the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the duties and functions of the village government in implementing village development. The method used in this research is descriptive qualitative method so that it can explain the object of research at the Sepakat Village office, Plampang Subdistrict, Sumbawa Regency. The data and information needed in this study were obtained from informants. The data collection techniques used in this study were direct observation at the research location and in-depth interviews, and documentation. The data was analyzed through data reduction, namely summarizing and focusing on important things and then drawing conclusions. The research shows that the duties and functions of the village government carried out are effective because there are several things that support them, including through planning and in the process of implementing development.

Keywords: Duties and Functions of village Government, Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Sepakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Desa Sepakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi pemerintah desa yang dilakukan sudah efektif karena ada beberapa

hal yang menjadi pendukung diantaranya melalui perencanaan dan dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa, Pembangunan

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat (1) Tahun 2014, menegaskan bahwa Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pada suatu desa sebagai bentuk organisasi pemerintah yang terendah tentunya pelaksanaan aktivitas pemerintah desa adalah menjalankan aktivitas pelayanan terhadap masyarakat desa guna mencapai tujuan dari pembangunan desa.

Pada hal ini, pemerintah desa terutama kepala desa sebagai pemimpin harus benar-benar dilaksanakan secara optimal dan kepala desa juga harus mampu untuk melakukan koordinasi dan melibatkan semua pihak, seperti seluruh perangkat desa, pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, hingga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Tujuannya adalah agar pelaksanaan

pembangunan desa dapat berjalan sesuai asas yang berlaku yaitu asas kebersamaan, transparan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Hal ini berarti pemerintah desa memiliki tugas dan fungsi harus benar-benar dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa menjadi aspek krusial dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Pembangunan desa mencakup berbagai sector, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, lingkungan, yang harus dikelola secara efektif dan transparan oleh pemerintah desa.

Pembangunan desa memegang peran yang sangat penting dalam upaya pencapaian dan penyelenggaraan pembangunan. Tugas dan fungsi pemerintah desa dalam hal ini sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, karena kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun

desanya. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu program pembangunan fisik dan program pembangunan non fisik.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sepakat adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Sepakat benar-benar dilaksanakan secara optimal dan kepala desa juga harus mampu melakukan koordinasi dan melibatkan semua pihak, seperti seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa.

Namun, kenyataannya masih ditemukan berbagai penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan ini. Pemerintah desa perlu memahami keinginan masyarakatnya agar semua terpenuhi dengan baik dan program pembangunan yang diharapkan berjalan sesuai rencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sepakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Subjek penelitian adalah pemerintah desa yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait tugas dan fungsi pemerintah desa. Observasi digunakan untuk mengamati kegiatan secara langsung, sedangkan

dokumentasi digunakan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa telah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari melaksanakan program pembangunan fisik yang meliputi pembangunan infrastruktur desa berupa pemerataan jalan desa dan pembangunan irigasi, pengelolaan fasilitas umum berupa pemeliharaan tempat ibadah, pengelolaan sumber daya alam berupa pembangunan embung untuk sarana air bersih dan program pembangunan non fisik meliputi peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan, pendidikan, dan kesehatan, pengembangan ekonomi desa

berupa pengembangan BUMDes, dan peningkatan pelayanan sosial desa berupa program bantuan untuk lansia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, bahwa tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa adalah melaksanakan program pembangunan fisik dan melaksanakan program pembangunan non fisik. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya.

Pemerintah desa bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Beberapa aspek yang mendukung keberhasilan pembangunan desa meliputi kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, alokasi dana desa yang tepat, serta koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah desa dan lembaga lainnya.

Tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu melaksanakan program pembangunan fisik dan melaksanakan program pembangunan non fisik. Program pembangunan fisik di Desa Sepakat merujuk pada infrastruktur desa berupa pemeliharaan jalan desa dan irigasi, fasilitas umum berupa pemeliharaan tempat ibadah, dan sumber daya alam berupa pembangunan embung untuk sarana air bersih. Semua program berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan fisik desa merupakan salah satu aspek utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program pembangunan fisik di Desa Sepakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi pedoman utama dalam penentuan program prioritas tahunan. Data realisasi pembangunan fisik setiap tahun menunjukkan bahwa program

yang tertuang dalam RKP dapat terealisasi dengan baik.

Salah satu aspek utama pembangunan fisik di Desa Sepakat adalah infrastruktur jalan. Sebelumnya, banyak jalan yang masih berupa tanah, berlubang, dan sulit dilalui, terutama pada saat musim hujan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jalan dengan menggunakan aspal dan paving block. Pembangunan ini berdampak pada meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pusat ekonomi dan layanan publik, seperti sekolah, pasar, dan puskesmas. Kemudahan aspek ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena distribusi hasil pertanian dan perdagangan menjadi lebih lancar.

Kemudian, seperti irigasi, tempat ibadah, pembangunan embung semua terlaksana dengan baik. Dikarenakan, setiap tahunnya pemerintah desa selalu melaksanakan perbaikan dalam program pembangunan desa, jadi tidak ada satupun program yang terlewatkan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, masyarakat memiliki akses lebih mudah ke

berbagai layanan publik dan peluang ekonomi yang luas. Sehingga lingkungan desa lebih nyaman dan tertata dengan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pembangunan non fisik juga tidak ada bedanya, sangat penting untuk masyarakat yang berdaya dan mampu mengelola pembangunan secara mandiri (Sugiyono, 2018). Beberapa aspek pembangunan non fisik meliputi pendidikan dan pelatihan, program peningkatan kapasitas seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, serta pendidikan informal bagi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi, pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes), program penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan non fisik merujuk pada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan keberhasilan

pembangunan non fisik secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sepakat telah melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa, pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes), sosialisasi tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas, pemberian bantuan kepada siswa yang kurang mampu dan berprestasi berupa beasiswa, serta bantuan untuk lansia. Semua program pembangunan non fisik di Desa Sepakat setiap tahunnya selalu stabil dan terealisasi dengan baik.

Pembangunan non fisik pada dasarnya untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Usaha yang dilakukan adalah melalui penyuluhan kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat untuk menerima dan merealisasikan tantangan pembangunan pada zaman sekarang. Oleh karena itu, pembangunan non fisik haruslah besinergi, jangan sampai pembangunan hanya ditekankan pada salah satu aspek saja, namun saling berjalan mengikuti perkembangan zaman.

Pemerintah desa dibantu masyarakat diperlukan agar pembangunan dapat tercipta, jangan sampai pembangunan hanya dibebankan pada pemerintah saja, melainkan masyarakatlah yang ikut berperan aktif dalam mengisi pembangunan. Sehingga tercapailah tujuan pembangunan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa program pembangunan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung serta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Faktor pendukung yang mempengaruhi pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal seperti, partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan yang efektif, dan komitmen yang tinggi dari aparatur desa (Hartono, 2020). Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pemerintahan desa itu sendiri yang membantu kelancaran pelaksanaan desa, seperti perangkat desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola

pemerintahan, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan anggaran menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan desa, ketersediaan sumber daya keuangan contohnya, pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi dana Desa (ADD), dan hasil pajak yang akan menunjang pelaksanaan pembangunan secara optimal.

Salah satu faktor pendukung kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sepakat karena masyarakat telah memahami posisi dan perannya. Selain itu juga, peran pemerintah desa juga menjadi penentu terciptanya kerjasama yang baik dengan masyarakat. Hal ini karena pemerintah desa sepakat mendorong masyarakatnya untuk ikut serta berperan dalam pembangunan. Dorongan dari pemerintah desa tidak hanya berupa ajakan maupun seru-seruan, pemerintah desa memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat ikut meniru dan akhirnya memahami posisinya.

Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa pada eksternal yaitu, dukungan pemerintah pusat dan daerah, kerjasama dengan pihak

swasta, serta adanya kebijakan pemerintah yang mendukung (Hartono, 2020). Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung eksternal yang berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Sepakat. Salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pembangunan di Desa Sepakat adalah kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Kebijakan yang mendukung, seperti program dana desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur, memberikan dorongan bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, adanya bimbingan teknis dan pelatihan dari pemerintah desa turut meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pembangunan desa.

Faktor-faktor eksternal tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk ekosistem pembangunan desa yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan

pembangunan desa yang efektif dan inklusif di Desa Sepakat. Dengan adanya kolaborasi yang baik, pembangunan desa dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat desa.

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa dibagi menjadi faktor eksternal seperti, kurangnya partisipasi masyarakat yang rendah dan program-program yang dilaksanakan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan resistensi dari masyarakat (Suharto, 2018). Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat eksternal yang berperan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Sepakat yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa karena kurangnya kesadaran atau rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Faktor penghambat biasanya muncul dalam tahapan perencanaan antara kerjasama pemerintah desa

dengan masyarakat dalam pembangunan, dalam tahap perencanaan biasanya akan muncul pihak yang setuju dan tidak setuju terutama dalam menentukan prioritas. Pihak yang tidak setuju nantinya akan menjadi penghambat karena akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan juga akan tersendat.

Untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak yang kontra, pemerintah desa melakukan pendekatan dan mengajak pihak-pihak yang tidak setuju tersebut bermusyawarah. Dengan begitu akan ditemukan solusi terbaik dari permasalahan yang timbul, sehingga permasalahan tidak sampai menghambat jalannya pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan maka disampaikan kepada pemerintah desa sepakat disarankan agar selalu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa. Diharapkan capaian yang telah pemerintah desa sepakat dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan desa terus

dapat dipertahankan dan semakin dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengacu kepada standar APA 6th dengan panduan sebagai berikut :

Buku :

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Miles, M., Huberman A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data Analysis*. Amerika: SAGE Publications.

Artikel in Press :

Minahasa, M. K. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, 5(1).

Jurnal :

Aditya, R., Haslan, M. M., & Yuliatin. (2019). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(1), 57–66.
https://juridiksiam.unra.m.ac.id/index.php/juridik_siam

Yuliatin, Y. (2023). *Pancasila*

Karakter Khas Bangsa
Indonesia. *Jurnal Ilmiah
Profesi Pendidikan*,
8(1), 460–467.
[https://doi.org/10.29303/
jipp.v8i1.1185](https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1185)